

# LAPORAN TAHUNAN ASPPUK 2010

Integritas Minim, Kesejahteraan Rakyat Melambat



ASPPUK

*Sekretariat Nasional ASPPUK*  
*Jl. Pintu 2 TMII No.37 A RT 015 RW 03, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13560, Telp. 021-8406172 Fax. 021-87780329 email: [asppuk@indo.net.id](mailto:asppuk@indo.net.id) website: [www.asppuk.or.id](http://www.asppuk.or.id)*

## Daftar Isi

Daftar isi	1
Visi dan misi ASPPUK	3
Kegiatan Pokok	4
A. Memfasilitasi dan menguatkan anggota asosiasi	
A.1 Penguatan ASPPUK Wilayah dan Anggota Melalui Perluasan Akses Sumberdaya	5
A.2 Pengembangan Kapasitas Pendamping PUK-mikro sebagai BDS (business development Services) yang Profesional	6
A.3 Fasilitasi Dewan Etik dalam uji coba kode Etik ASPPUK terhadap anggota	8
A.4 Penguatan LSM Anggota dalam upaya mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara di tingkat basis	8
A.5 Peningkatan kapabilitas Pendamping dengan Workshop Telaah Ulang Ekonomi Rakyat Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Pasar Bebas	9
B. Penguatan PUK-mikro	
B.1 Pendampingan PUK dan JARPUK dalam pengembangan usaha dan kesadaran Kritis	10
B.2 Peningkatan Kapasitas Usaha PUK-mikro	11
B.3 Fasilitasi Pengembangan Pasar	13
B.4 Penguatan organisasi JARPUK	15
B.5 Monitoring LKP	17
B.6 Advokasi Kebijakan di Tingkat Kabupaten	18
C. Publikasi	
C.1 Berita PUK-mikro melalui Website	19
D. Advokasi dan networking	
D.1 Tingkat Jarpuk; Pengembangan Aliansi Jarpuk	19
D.2 Tingkat Nasional	20
E. Pengembangan Kapasitas lembaga	
E.1 Website Maintenance dan Pengembangan Data Base	21
E.2 Monitoring JARPUK	22
E.3 Monitoring Ornop Anggota	22
E.4 Monitoring Konsep BDS	22
F. Jaringan Kerja	23
G. Penutup	24

## LAPORAN TAHUNAN 2010

### **Integritas Minim, Kesejahteraan Rakyat Melambat**

Tahun 2010 merupakan periode ke 11 era reformasi Indonesia. Selama itu, pemilu demokratis berjalan setiap lima tahun untuk rakyat menilai wakilnya di legeslatif dan eksekutif. Sayangnya, situasi ini tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan dan terjaminnya hak sosial rakyat. Korupsi sebagian besar eksekutif dan legeslatif tingkat pusat dan daerah berdampak kepada penurunan kesejahteraan rakyat miskin – khususnya perempuan dan anak – yang kian memprihatinkan. Kondisi itu terlihat dari melonjaknya angka kemiskinan yang berjumlah 38,70 juta (19,14%) di tahun 2000 menjadi 35,10 juta (15,97%) di tahun 2005, dan tahun 2006 menjadi 39,30 juta (17,75%) (BPS; 2006), dan selama periode Maret 2009 hingga 2010, angka kemiskinan berjumlah 0,82 persen dibanding maret 2008 – maret 2009 sebesar 1,27 persen (kompas/12/7/10). Sehingga jumlah penduduk miskin hingga bulan Maret tahun 2010 berjumlah 31,02 juta atau 13,33 %.



Kondisi diatas terjadi – salah satunya -- karena rendahnya alokasi anggaran di APBN dan APBD terhadap program kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kelompok perempuan dan anak. Kajian terhadap anggaran kesehatan dari APBD 2007 – 2009, memperlihatkan alokasi anggaran kesehatan hampir di seluruh pemda (pemerintah daerah) kurang dari 15%. Padahal batas minimum 15% dari APBD merupakan alokasi anggaran yang harus dipenuhi pemerintah daerah berlandaskan UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan (*fitra*, 2009). Sementara di sector pendidikan, meski alokasi anggaran dalam APBD dianggap memadai, namun efektifitas penggunaannya masih dipertanyakan, karena mereka memprioritaskan pembangunan infra struktur dibanding peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Gambaran serupa terjadi pada penggunaan APBD 2006 di 47 kabupaten/kota di Indonesia, yang menggambarkan; *pertama*, APBD tidak berpihak pada permasalahan rakyat, khususnya rakyat miskin dan perempuan. *Kedua*, masih besarnya belanja aparatur yang mencapai 80 – 85 % sedang belanja publik 15 – 20 %. *Ketiga*, anggaran belanja untuk mengatasi problem ketidakadilan gender (seperti situasi perempuan) tidak memadai. *Keempat*, PAD (pajak asli daerah) dalam APBD lebih kecil (prosentasinya dibawah 10%) dibanding dana perimbangan pemerintah pusat. *Kelima*, sejumlah item dalam belanja publik, jumlah anggarannya tidak realistis dan tidak jelas manfaatnya, khususnya bagi perempuan dan kaum miskin (ASPPUK, 2007).

Situasi tersebut menyedihkan, karena penyusunan APBD merupakan langkah awal untuk pembangunan kesejahteraan rakyat dalam setahun. Hal tersebut mencerminkan rendahnya integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas, sehingga

menyuburkan korupsi. Akibatnya program dan kebijakan kesra (kesejahteraan sosial) khususnya yang diperuntukan rakyat miskin, tidak efektif dan salah sasaran. Padahal negara Indonesia menjamin hak setiap warga untuk mengakses sumberdaya, sebagaimana tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Oleh karena, peran masyarakat sipil yang *berorientasi* kepada kesejahteraan rakyat menjadi penting.

Di pihak lain, kewirausahaan rakyat yang bisa lepas dari jerat kemiskinan, menemui kendala. Diantaranya iklim usaha yang belum berpihak kepada UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dimana sektor usaha menengah dan besar masih jadi prioritas pemerintah. Pendirian Mall dan Supermarket yang “mematikan” UMKM menjadi pemandangan umum. Bahkan, permodalan yang dijanjikan melalui program KUR (kredit untuk rakyat), pada realitasnya belum sampai kepada sasaran UMKM.

Laporan berikut merupakan gambaran kegiatan ASPPUK selama tahun 2010. Semua aktifitas diorientasikan untuk penguatan ekonomi-politik PUK untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perempuan usaha kecil-mikro di tingkat akar rumput. Secara umum, kegiatan tersebut menjadi bagian *integral* demi terwujudnya *Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender*.

## **Visi & Misi ASPPUK**

### **Visi**

Terwujudnya Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.

### **Misi**

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi.
- Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK-mikro terhadap sumberdaya ekonomi.

Dalam mewujudkan **Visi** dan mengemban **Misi**, ASPPUK berpegang pada nilai;

- Non Partisan
- Non profit
- Keberlanjutan
- Profesional
- Independen
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Kesetaraan dan Keadilan Jender
- Anti Diskriminasi
- Kerelawanan

- Demokratis
- Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### **Program Pokok ASPPUK**

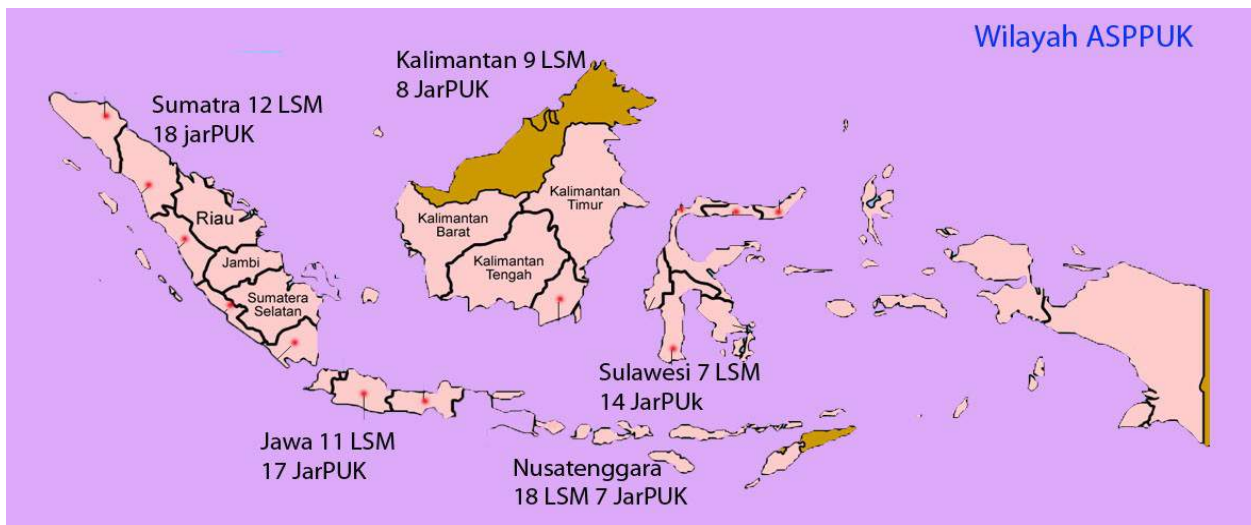
Secara garis besar, ASPPUK mempunyai lima program, yaitu; *pertama*, penguatan ornop anggota dalam pendampingan PUK-mikro, advokasi kebijakan, networking dan fund raising; *kedua*, penguatan PUK-mikro melalui pendampingan, pelatihan, studi banding, pengembangan usaha, networking secara internal dan eksternal; *ketiga*, membangun dan menguatkan jaringan pasar bagi produk PUK-mikro; *keempat*, advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan PUK-mikro; *kelima*, networking; *keenam*, publikasi.

Semua kegiatan ASPPUK dilakukan melalui; *pertama*, dengan menggalang gerakan PUK-mikro di level *grassroot*; *kedua*, dengan melakukan perubahan kebijakan yang adil bagi PUK-mikro.

### **Kegiatan Pokok**

- A. Memfasilitasi dan Menguatkan Anggota Asosiasi**
- B. Penguatan PUK-mikro.**
- C. Membangun dan menguatkan Jaringan Pasar bagi Produk PUK-mikro**
- D. Advokasi Kebijakan**
- E. Networking**
- F. Publikasi**

## Peta Wilayah Anggota ASPPUK



### Kegiatan Pokok

#### A. Memfasilitasi dan Memperkuat Anggota Asosiasi

Penguatan anggota ASPPUK dilakukan sebagai berikut;

##### *A.1. Penguatan ASPPUK Wilayah dan Anggota Melalui Perluasan Akses Sumberdaya*

Sesuai strategi desentralisasi ASPPUK, sekretariat nasional (seknas) ASPPUK memfasilitasi sekretariat ASPPUK wilayah dan anggota untuk mengakses sumber daya demi keberlangsungan kegiatan di wilayah. Salah satunya adalah upaya penggalangan informasi terhadap sumber daya dan fasilitasi anggota dalam mengakses program pengembangan usaha dan kesadaran kritis PUK melalui NGO pendamping di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa dan Sumatera. Dalam hal itu, seknas secara berkala mengirim informasi sumber-sumber pendanaan program. Selain itu, seknas juga aktif memfasilitasi upaya penyusunan proposal secara konsorsium dan menjalin komunikasi di dalam satu wilayah dalam akses sumber daya.

Dampaknya, harus diakui tidak semua NGO anggota di semua wilayah mendapatkan hasil maksimal, terutama dalam pengaksesan sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan PUK-mikro melalui NGO anggota. Salah satu sebabnya karena secara global dan nasional terjadi penurunan pendanaan pembangunan dari negara maju kepada Indonesia yang dinilai telah menjadi “middle income country”, selain juga keterbatasan informasi. Oleh karenanya, situasi ini menjadi refleksi seknas masukan di tahun yang akan datang.

## ***A.2. Pengembangan Kapasitas Pendamping PUK-mikro sebagai BDS (business development Services) yang Profesional***



Di tahun 2010 ASPPUK – baik di tingkat nasional dan wilayah -- secara kontinue melakukan peningkatan kapasitas pendamping dalam pengembangan usaha PUK dan peningkatan kesadaran kritis. Tujuannya sebagai “jalan” pendamping untuk menjadi BDS yang profesional. Wilayah yang mendapat fasilitas tersebut; Jawa, Kalimantan Barat dan Sumatera –di Padang). Peningkatan kapasitas pendamping tertuang dalam program

“PENGEMBANGAN USAHA KECIL-MIKRO SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI RAKYAT”, kerjasama antara ASPPUK dan Hivos, dari tahun 2008 hingga 2011.

Di Padang, Jawa dan Kalimantan Barat, peningkatan kapasitas dilakukan dengan melibatkan konsultan Bisnis dalam pendampingan usaha PUK di lapangan. Adanya “couching” konsultan kepada pendamping, diharapkan kemampuan pendamping akan meningkat. Sehingga terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan dari konsultan kepada pendamping dalam periode 2 tahun. Selanjutnya pendamping diharapkan mampu memfasilitasi dan memberi konsultasi bisnis kepada PUK.

Di Padang, kegiatan diawali dengan diskusi dengan konsultan bisnis tentang arah dan model konsultasi bisnis PUK ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan bersama dengan konsultan ke kelurahan Batu Gadang dan Gunung Sarik, sebagai klaster produk Olahan dan dagang untuk melihat kondisi terakhir usaha PUK. Kondisi paska gempa juga menjadi hal yg tak terlupakan (30 September 2009). Selain itu juga memotivasi dan meningkatkan pasar, permodalan dalam berusaha dan mencari kemungkinan membangun jaringan permodalan dengan stakeholder lain.

Di Kalimantan Barat, pelibatan konsultan bisnis dilakukan bagi pendamping di kab. Sintang untuk jenis usaha tenun ikat, kab. Sambas untuk usaha tenun benang mas dan Singkawang untuk usaha makanan (kerupuk ikan dan trasi), kab. Sanggau (perluasan wilayah) untuk usaha anyaman rotan, dan kota Pontianak untuk jenis usaha makanan olahan. Di wilayah Jawa, untuk pendamping di kabupaten Sukoharjo dan Kudus belum menggunakan jasa konsultan bisnis di tahun 2010. Namun kota Solo, pendampingan PUK untuk pengembangan usaha telah



melibatkan “konsultan bisnis”, yaitu dalam membangun pasar krempyeng Purwodiningratan, perencanaan bisnis untuk pengembangan produk makanan untuk pengembangan MPUK sebagai unit yang memfasilitasi perdagangan.

Hasil dari pengembangan BDS dan juga sebagai wahana untuk promosi produk PUK, telah diaktifkan unit perdagangan M-PUK (Mitra PUK) yang telah memasarkan berbagai produk PUK. Produk yang dijual tidak hanya yang sedang dipasarkan, namun juga diberi masukan kualitas produknya. Produk yang dipasarkan melalui MPUK, ialah; tas MS collection bu Marsi, sirup beras Kencur Bu Yennys, Cumi-cumi mbak Dewi, Mukena dan Batik Rika Collection, Batik Warna Alam (kain) mbak Tya, Batik (bluse, hem,dll) Mbak Anik, Batik (bluse, hem, dll) dari Nurul, Aneka Bordir (kerudung, mukena, kain) dari Kudus, Aneka makanan (bolen , kue kering, ceriping, dsb) dari Sukoharjo, Aneka makanan dari kelompok Purwodiningratan.

Selain itu berkat pendampingan rutin pendamping (BDS) di Sukoharjo, baik secara personal maupun kelompok, mulai terlihat peningkatan usaha (omset, pengembangan jenis produk dan jaringan pasar) PUK, baik di sektor usaha makanan olahan (sebagai produk unggulan) dan sektor usaha kerajinan, terutama batik. Produk makanan olahan juga mengalami peningkatan dari jenis dan jumlah produk, dimana pada awal program, jenis produk yang dikelola PUK, rata-rata semula hanya mampu membuat 1 jenis, namun kini mampu membuat 2 atau lebih jenis produk lain, dan telah beredar di pasar.

Hal itu terlihat dari pernyataan **Miyani**, PUK Sukoharjo, bahwa di awal program, ia hanya memproduksi cumi-cumi, sekarang menambah jenis produk lain, yakni; stik balado dan wingko babad. Bu **Surati** juga sama, saat ini ia tidak hanya memproduksi bolen, tetapi sudah menambah jenis kue kering dan basah lainnya. **Siti**, dulu hanya menjual produk teman – teman PUK, saat ini memproduksi dan memasarkan kue-kue buatan sendiri. **Mulyani** menambah jenis dodol tape, dari yang semula hanya memproduksi keripik singkong. **Ani**, dulu hanya memproduksi rambak, saat ini menambah intip. **Rika**, yang semula hanya menjual makaroni goreng, sekarang menambah produk kripik tempe, dsb. Selain itu juga peningkatan omset di sebagian anggota jar-PUK Sukoharjo, dimana pada awal program, omsetnya rata – rata hanya kurang dari Rp. 2 juta sebulan, sekarang mengalami kenaikan. Ada yang mengungkap pendapatan kotornya lebih dari 2 juta perbulan, bahkan ada yang mencapai lebih dari 10 juta.

ASPPUK Wilayah Jawa juga melakukan diskusi kritis tentang Analisis Ekonomi Rakyat sebagai sebuah gerakan dengan nara sumber Hendro Sangkoyo. Diskusi ini diikuti semua tim sekretariat ASPPUK wilayah Jawa, dan anggota yang berdekatan dengannya. Dalam hal itu dikaji strategi pendekatan ASPPUK, menggali model analisis pengembangan ekonomi yang berbasis pada lingkungan, pemetaan Jarpuk yang siap untuk melakukan upaya membangun gerakan dilevel lokal, dan mendorong perubahan ke arah gerakan PUK. Dari situ keluar rekomendasi seperti; akan dilakukan analisis sosial di level lokal dalam bentuk pelatihan langsung dilapangan dengan sebutan “sekolah lapang”. Sekolah lapang mengikutsertakan pendamping yang konsern terhadap gerakan dan kader PUK yang mempunyai kepedulian untuk mengembangkan pengorganisasian dilingkungannya.



### ***A.3. Fasilitasi Dewan Etik dalam uji coba kode Etik ASPPUK terhadap anggota.***

Di tahun 2010, Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) yang berperan sebagai badan penegak kode etik ASPPUK melakukan try out penerapan kode etik kepada salah satu anggota ASPPUK di Pontianak. Try out penerapan dilakukan setelah MPO berhasil merampungkan kode etik dan menyepakatinya di forum nasional luar biasa ASPPUK di tahun 2009.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan anggota MPO, Lusi Herlina, bersama anggota KEN yang berasal dari Kalimantan Barat, Reny H. Hidjazie, serta diikuti M. Firdaus, sebagai deputy SEN ASPPUK. Mengingat keterbatasan dana, aktifitas tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pokja Akuntabilitas yang melakukan workshop tentang akuntabilitas LSM di Kalimantan Barat. Adapun lembaga anggota yang menjadi uji coba pelaksanaan kode etik adalah Gemawan. Try out dihadiri salah satu dewan pengurus, direktur eksekutif, dan sejumlah staf pelaksana Gemawan.

Hasilnya adalah ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan ulang pada forum -- sebagai pertemuan tertinggi -- untuk melakukan perubahan kode etik. Dan secara umum, Gemawan telah sesuai dengan ketentuan apa yang digariskan dalam Kode etik ASPPUK yang direvisi.

### ***A.4. Penguatan LSM Anggota dalam upaya mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara di tingkat basis***



Kegiatan penguatan kapasitas LSM anggota berupa workshop “analisa program dan kebijakan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Republik Indonesia” dilandasi kondisi reformasi Indonesia yang memasuki tahun ke 11, namun kondisi tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan dan terjaminnya hak sosial rakyat. Korupsi sebagian besar pejabat eksekutif dan legislatif tingkat pusat dan daerah berdampak kepada tingkat kesejahteraan rakyat miskin – khususnya perempuan dan anak – yang kian memprihatinkan. Selain tingginya angka kemiskinan, rendahnya integritas dan akuntabilitas pejabat negara menyebabkan lambatnya laju penurunan angka kemiskinan selama periode Maret 2009 hingga 2010, yang berjumlah 0,82 persen dibanding Maret 2008 – Maret 2009 sebesar 1,27 persen (*kompas/12/7/10*). Akibatnya total penduduk miskin hingga bulan Maret tahun 2010 berjumlah 31,02 juta atau 13,33 %. Kondisi diatas terjadi – salah satunya -- karena rendahnya alokasi anggaran di APBN dan APBD terhadap program kesejahteraan rakyat (*lihat kajian fitra, 2010*).

Penyusunan dan implementasi kebijakan diwarnai “kongkalikong” antara eksekutif dan legislatif. Padahal, secara konseptual negara menjamin hak warga untuk mengakses sumberdaya, sebagaimana ditulis Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28. Atas dasar itu,

peran masyarakat sipil yang *berorientasi* kepada kesejahteraan rakyat menjadi penting. Termasuk dalam hal ini, mendorong ASPPUK beserta jaringan di 5 daerah, yaitu Banda Aceh, kab. Karo, Kab. Klaten, Kota Pontianak dan kab. Kupang, untuk mengadakan workshop tersebut. Kegiatan ini sebagai bagian dari program “Penguatan Masyarakat untuk Terwujudnya Integritas dan Akuntabilitas”, dari SIAP 2 (*Strengthening Accountability and Integrity Program II*) yang berlangsung dari Juni 2010 – April 2012.

Workshop bertujuan, *pertama*, untuk menyusun hasil analisa program dan kebijakan Kesra pemerintah khususnya di tingkat basis. *Kedua*, merumuskan strategi analisa dan alat monitoring program dan kebijakan kesra pemerintah. Workshop dilaksanakan dari tanggal 3 s/d 6 Agustus 2010, di Hotel Permata, Jl. Raya Pajajaran No.35 Bogor, tlp 0251 – 8318007, 8345679, fax : 0251 – 8311061. Yang hadir dalam workshop adalah aktvis CSO anggota ASPPUK dan kader perempuan yang mewakili kelompok perempuan basis di 5 daerah, pengurus ASPPUK dan staf sekretariat nasional ASPPUK.

Dari workshop dihasilkan; *pertama*, terpetakannya program kesra dan situasi awal integritas dan akuntabilitas pemerintah khususnya di tingkat basis dalam menjalankan program kesra. *Kedua*, adanya alat analisa program dan kebijakan kesra pemerintah hingga ke tingkat basis (desa dan kecamatan). *Ketiga*, peserta mempunyai kemampuan untuk menyusun alternatif program yang sesuai kebutuhannya dengan pedoman kinerja (sesuai permendagri). *Keempat*, adanya rencana tindak lanjut di 5 daerah untuk melakukan kerja yang berkaitan dengan terwujudnya integritas dan akuntabilitas kinerja pemerintah di 5 daerah.

#### ***A.5. Peningkatan kapabilitas Pendamping dengan Workshop Telaah Ulang Ekonomi Rakyat Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Pasar Bebas***

Workshop “Telaah Ulang Ekonomi Rakyat Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ditengah Pasar Bebas”, dilakukan sebagai sarana untuk pemahaman bersama tentang design dan persiapan pelaksanaan program “*Memfasilitasi Perempuan Miskin Dalam Mengembangkan Aset Finansial dan Partisipasi Dalam Lembaga Pengambil Keputusan Publik di Tingkat Kampung, Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Nusatenggara Timur*”. Workshop yang dilakukan pada tgl 18



– 21 November 2010 di Hotel Pangrango Bogor, dihadiri perwakilan pengurus JARPUK/Kader dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Makasar dan Kota Kupang, pendamping NGO pelaksana program, pengurus wilayah ASPPUK Sumatera, Nusatenggara, Sulawesi dan Jawa, pengurus nasional dan sekretariat nasional ASPPUK. Kegiatan itu merupakan kerjasama antara ASPPUK dan Ford foundation untuk penguatan ekonomi rakyat sebagai wahana untuk menanggulangi kemiskinan.

Catatan penting workshop ialah; kaderisasi CO perlu dilakukan terus sehingga makin banyak perempuan yang berperan sebagai motor penggerak di wilayah, dan tidak tergantung beberapa kader tertentu, penguatan manajemen LKP, terutama sistem dan pengelolanya yang harus mandiri dan berkembang, peningkatan usaha PUK terkait kualitas produk, pemasaran dan manajemen agar dapat bersaing di era pasar bebas, komitmen dan kepemimpinan pengurus KPUK/JARPUK/LKP menjadi kunci utama keberhasilannya. Menyadari bahwa pasar domestik yang luar biasa dan perlu digarap serius dibanding konsentrasi ekspor, perlu melakukan analisa potensi dengan melakukan penghitungan ulang omset produk-produk PUK-mikro. Selain itu, pendekatan pemberdayaan PUK, bukan hanya usaha tapi holistik, dengan menggunakan indikator kemandirian kelompok/JARPUK/LKP yang dibuat bersama kelompok basis. Workshop juga menyepakati peran dan tanggungjawab setiap komponen pelaksana program (Seknas, ASPPUK Wilayah dan NGO pelaksana) dan alur pertanggungjawaban serta koordinasi antar komponen.

## **B. Penguatan PUK-mikro**

### ***B.1. Pendampingan PUK dan JARPUK dalam pengembangan usaha dan kesadaran kritis***



Di tahun 2010, penguatan PUK dan JARPUK dilakukan melalui pendampingan dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesadaran kritis. Di pengembangan ekonomi, pendampingan integratif telah dilakukan dalam program sebagian besar ornop anggota. Pendampingan anggota kepada PUK diarahkan untuk peningkatan usaha (termasuk LKP sebagai sarana permodalan), pengembangan diri dan organisasi JARPUK. Hingga kini, pendampingan anggota dilakukan dengan intensitas yang beragam. Untuk NGO yang memiliki dukungan program, pendampingan dilakukan intensif, sebagaimana terlihat di JARPUK wilayah Jawa, yakni; Solo, Sukoharjo, Klaten, Kudus, Bantul, Jabodetabek, Semarang, Banyumas, Sukabumi, Pandeglang. Begitupula di wilayah Sumatera Barat, yakni kota Padang dan Padang Pariaman, dan Kalimantan Barat, yakni; kota Pontianak, kab. Pontianak, kab. Kubur raya, Sintang, Sambas, dan Singkawang. Di wilayah tersebut perkembangan PUK bergerak naik, baik secara pribadi, usaha dan posisinya dalam masyarakat. JARPUK juga aktif dalam kegiatan advokasi, seperti di Solo, Kudus, Sambas, Klaten, Wonogiri yang mencermati anggaran pembangunan daerah, dan kab Sukoharjo yang mengadvokasi pembuatan PERDA (peraturan daerah) yang mendukung UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

Pendampingan dalam bidang ekonomi secara integratif dimulai akhir tahun 2008 hingga akhir tahun 2011 dengan bekerjasama dengan HIVOS, di daerah tersebut. Di tahun yang sama pendampingan pengembangan usaha dilakukan pula di kab. Lombok Tengah oleh Ornop anggota ASPPUK secara konsorsium dibawah kendali ASPPUK Wilayah Nusa Tenggara. Program dilaksanakan hingga tahun 2011 dengan bekerja sama antara ASPPUK wilayah Nusa Tenggara dengan Acces Australia.

Selain itu, di pengujung tahun 2010 pendampingan pengembangan ekonomi dan organisasi JARPUK khususnya perluasan wilayah pendampingan dan recovery daerah gempa (seperti di kota Padang) dilakukan di Makasar Sulawesi Selatan, Gresik dan Jombang di Jawa Timur, Padang Sumatera Barat, kota Kupang NTT dan kab. Bantul di Yogyakarta. Pendampingan tersebut diarahkan bagaimana KPUK mampu menjadi lokomotif pengembangan usaha sehingga mereka menjadi agen penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Program pengembangan ekonomi rakyat sebagai upaya penganggulangan kemiskinan dilakukan akhir tahun 2010 hingga tahun 2012 dengan kerjasama antara ASPPUK dan Ford Foundation.

Sementara itu, pendampingan dalam bidang peningkatan kesadaran kritis dilakukan dengan upaya penguatan masyarakat melalui kelompok perempuan untuk mewujudkan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara (*Strengthening Accountability and Integrity Program II*) program. Kegiatan pendampingan tersebut meliputi; diskusi kampung di 3 desa tentang analisa program dan kebijakan di tingkat desa dalam satu kecamatan, workshop tingkat kecamatan, fgd dan pembentukan forum integritas, dan advokasi berupa hearing dengan pengambil kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten dan talk show di radio serta konferensi pers. Pendampingan tersebut dilakukan di Banda Aceh, kab. Karo Sumut, kab. Klaten Jawa Tengah, kota Pontianak Kalimantan Barat, dan kab. Kupang NTT. Program dilaksanakan dengan anggota konsorsium lain seperti FITRA, LSPP, TIRI Indonesia dan Partnership yang disupport USAID.

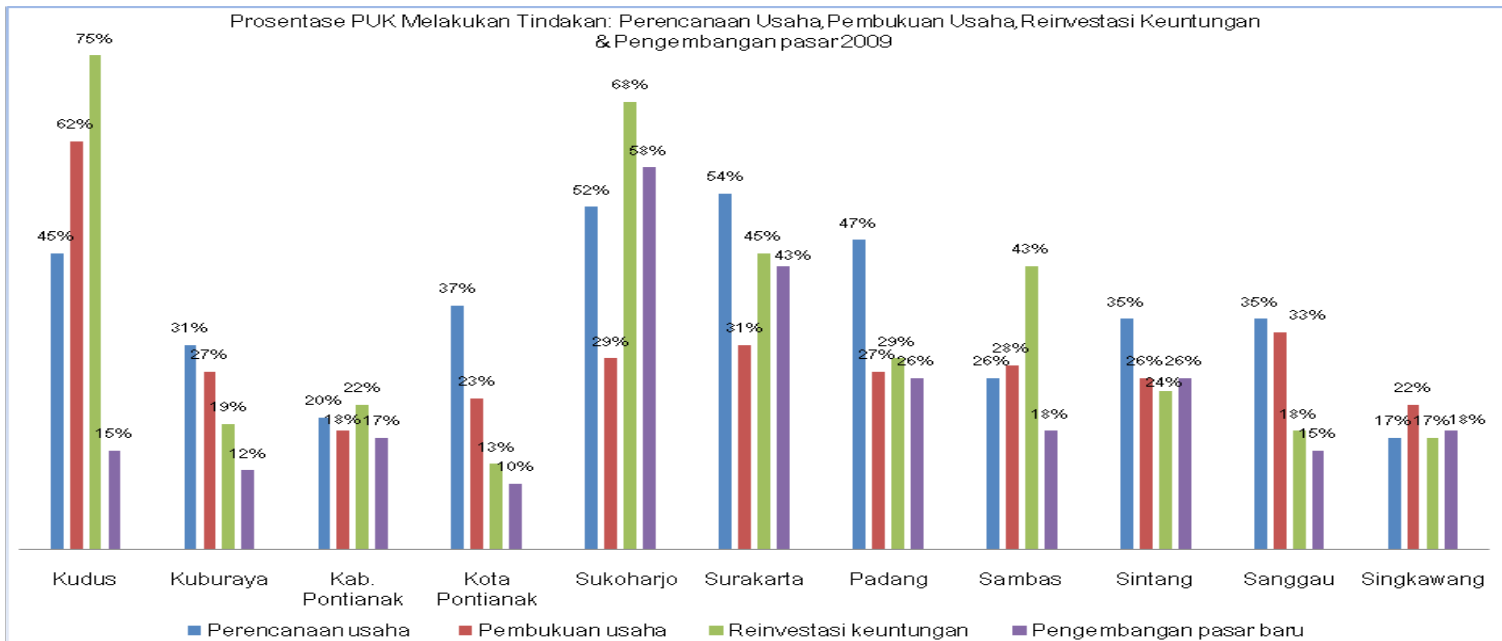


Untuk wilayah lain, pendampingan pada aspek bisnis mengalami hambatan. Fasilitasi pengembangan secara bersama sulit dilakukan karena heterogenitas usaha dan berskala mikro. Hal ini merupakan permasalahan lama ASPPUK, namun sulit teratasi karena keterbatasan kapasitas ornop dalam penyediaan staf pendamping. Pelatihan pendampingan yang dilakukan ASPPUK tahun ini dirasakan manfaatnya, apalagi diperkuat dengan pendataan PUK yang sistematis.

### ***B.2. Peningkatan Kapasitas Usaha PUK-mikro***

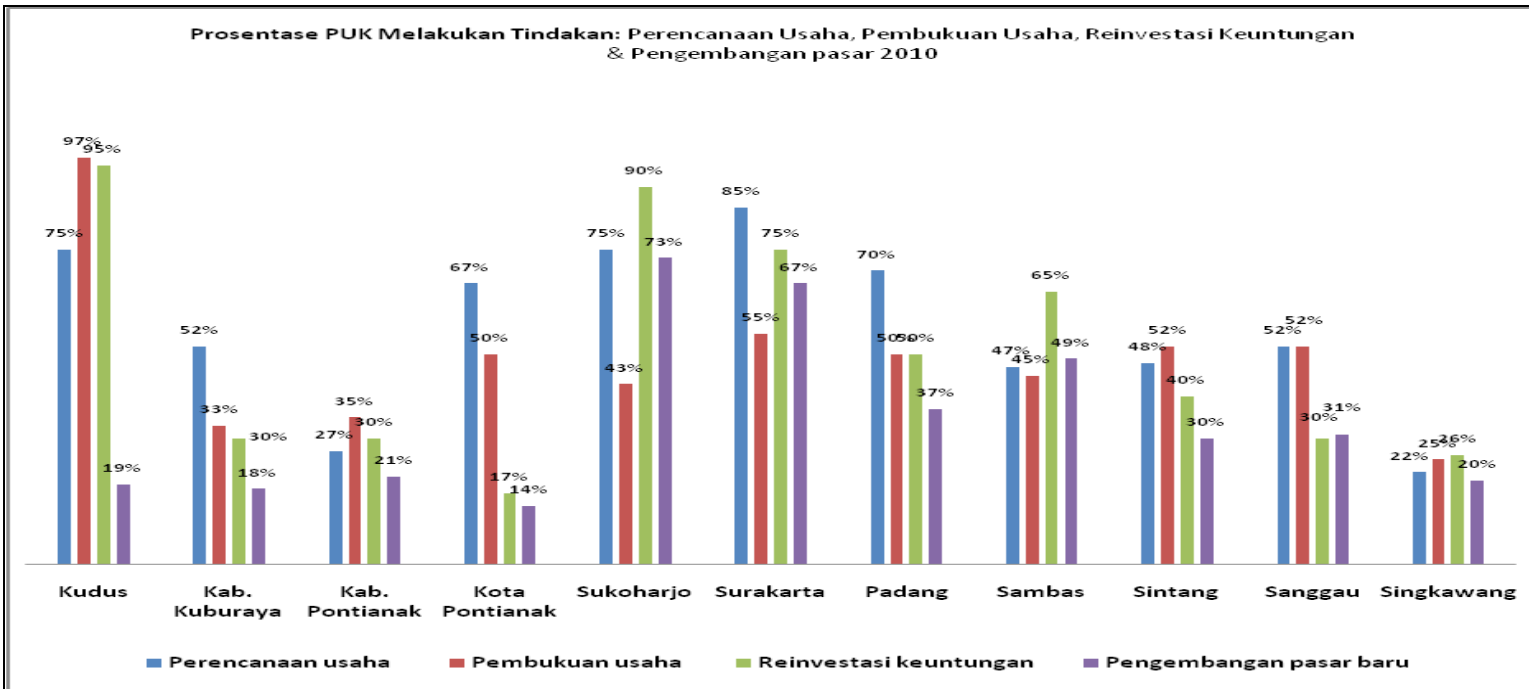
Banyak kegiatan yang dilakukan tahun 2010 untuk meningkatkan kapasitas usaha PUK. Selain pendampingan usaha juga dilakukan sejumlah aktifitas, seperti; pelatihan, kursus singkat pembukuan, belajar bersama tentang produk-produk baru, kunjungan antar PUK untuk belajar produk yang disesuaikan kebutuhan dan tuntutan KPUK. Selain penguatan teknis berupa pelatihan produk, ada juga penguatan yang bersifat motivasional, seperti yang dilakukan JARPUK solo dengan mengadakan pelatihan motivasi usaha yang dipandu Gus Ming, pakar motivasi Solo. Upaya peningkatan kemampuan PUK dilakukan baik atas prakarsa murni ASPPUK dan NGO pendamping, maupun inisiatif JARPUK dan KPUK untuk mengakses pelatihan yang diselenggarakan pemda dan pihak swasta.

Dari sejumlah intervensi penguatan kapasitas pengembangan usaha, berikut hasilnya yang terangkum dalam grafik.



Bila dicermati, beberapa intervensi yang dilakukan seperti dalam hal; perencanaan usaha, pembukuan usaha, reinvestasi keuntungan dan pengembangan pasar baru, telah terjadi kenaikan yang variatif di 3 wilayah tersebut. Hal itu terlihat dari pada gambaran tahun 2009 adalah sebagai berikut; di daerah Sukoharjo terlihat pada tahun 2009, terdapat 52% yang melakukan perencanaan usaha, 29% yang melakukan pembukuan usaha, 68% yang melakukan reinvestasi usahanya dan 58% melakukan pengembangan pasar baru (seperti terlihat dalam bagan selanjutnya).

Pada pendataan tahun 2010, terjadi peningkatan prosentasi di empat hal penguatan usaha di kab. Sukoharjo. Hal itu sebagaimana terlihat bahwa ada; 75% anggota JARPUK yang melakukan perencanaan usaha, 43% melakukan pembukuan usaha, 90% yang melakukan reinvestasi keuntungan usaha dan 73% yang melakukan pengembangan pasar baru. Kenaikan prosentasi dari intervensi pengembangan kapasitas usaha terhadap PUK bervariasi sesuai dengan situasi wilayah dan juga kapasitas kelembagaan anggota. Hal itu terlihat di dalam bagan berikut ini.



Selain itu, pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah memotivasi anggota kelompok yang belum mempunyai usaha memulai usaha dan bagi anggota yang sudah memiliki usaha, mencoba merintis usaha baru. Di Solo, ada 7 orang perempuan yang memulai usaha batik dengan pewarnaan alam dan 8 orang usaha produk makanan/minuman olahan. Di Sukoharjo, 46 orang memiliki usaha baru berupa makanan olahan dan 15 orang batik warna alam. Di Kudus, 10 orang memiliki usaha baru produk makanan olahan, 11 orang salon dan 4 orang katering. Sementara di Kalimantan Barat, 8 orang memiliki usaha kerajinan rotan, 3 orang kerajinan pandan, 15 orang beras organik, 40 orang makanan/minuman olahan dan 5 orang memiliki usaha tenun ikat. Di Padang, ada 2 orang memiliki usaha baru kue kering dan 1 orang warungan. Dari gambaran tersebut tersimpulkan bahwa telah terjadi kenaikan tren positif terhadap hasil intervensi kegiatan peningkatan kapasitas bagi PUK dengan kualitas peningkatan yang beraneka ragam. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi nasional dan daerah, kualitas pendamping sebagai BDS, dan problem gender yang telah berusaha diatasi selama proses pendampingan, dsb.

### **B.3. Fasilitasi Pengembangan Pasar**

Sebagaimana di tahun sebelumnya, pengembangan pasar merupakan kegiatan penting bagi JARPUK. Di 3 wilayah seperti Jawa Tengah (kota Solo, Kudus, dan Sukoharjo), Sumatera (kota padang), dan Kalimantan Barat (Kota pontianak, kab, Pontianak, Kubur Raya, Sambas, Sintang dan Singkawang) yang mendapat fasilitasi program kerjasama dengan Hivos, geliat pasar mulai



tampak. Hal yang sama juga di JARPUK Lombok Tengah yang mendapat support dari Acces, dimana penguatan dalam akses pemasaran memperoleh dampak signifikan.

Berkat konsultasi pasar oleh konsultan terutama di 3 wilayah (Padang, Kalbar dan Jawa) menjadi trobosan penguatan produk dan pesar PUK. Asistensi konsultan telah menambah wawasan berharga untuk mengeksplorasi alternatif pasar dari yg selama ini ada. Pasar yang selama ini menjadi lahannya dipertahankan, dan di tahun 2010 dicari alternatif pasar untuk mengembangkan produk PUK.

Di wilayah Jawa, Jarpuk Ngudi Lestari Solo, selain rutin mengikuti pameran dan memasarkan produknya (seperti Konveksi, Kuliner dan Handycraft) di pasar malam Ngarsopuro, ada 25 PUK yang berjualan di pasar Krempyeng Purwodiningratan yang resmi dibuka pada tanggal 9 mei 2010 dengan melakukan; memindahkan tempat jualan agar jam buka bisa lebih panjang, dan melakukan promosi lebih gencar, serta mengevaluasi besarnya pungutan. Sementara di Sukoharjo,



pengembangan jaringan pasar bagi Jar-PUK Kartini, selain kerjasama dengan PUK lain, juga menjalin kemitraan dengan swalayan dan dengan dinas. Pada bulan Nopember 2010, jar-PUK terlibat mengikuti bazar yang diselenggarakan dinas koperasi dan UMKM dalam rangka penutupan TMMD di kecamatan Bendosari. Kemudian dalam rangka melakukan peningkatan kualitas produk PUK, tim uji seleksi telah membuat kriteria tentang kelayakan produk yang bertugas untuk mengevaluasi dan mengontrol kualitas produk anggota jar-PUK. Saat ini tercatat ada 24 Jenis produk yang sudah terseleksi, masuk dalam kriteria “layak produk” di Sukoharjo.

Di Kudus, kegiatan pengembangan pasar dilakukan selain pendampingan individu, juga mengikuti kegiatan lain seperti Bazar IWAPI tanggal 1-2 Oktober 2010 yang diselenggarakan IWAPI propinsi Jateng di Pendopo kab. Kudus. Produk yang dipasarkan meliputi produk makanan dan produk bordir. Hasil yang didapat dalam pengembangan pasar adalah bertambahnya jaringan pengembangan pasar produk jarpuk, mulai dikenalnya keberadaan jarpuk di kabupaten Kudus, dan mulai ada rekanan baru dari luar daerah Kudus.



Di kota Padang, PUK anggota JARPUK melanjutkan apa yang dirintis sebelumnya yaitu memfasilitasi pengembangan pemasaran produk-produk unggulan PUK dengan memasukannya kepada pemilik trading house/pengusaha seperti toko Christine Hakim dan Citra Swalayan Group, yang terkenal di kota Padang. Adapun produk yang diterima di situ adalah wajik bandung, macho badarai, kue

pia dan kue kering lainnya. Sedangkan produk PUK yang dipasarkan Citra Swalayan Group adalah kue kering dan basah (wajik padang dan wajik bandung). Kini mereka sedang membuat katalog/profil JARPUK sebagai bahan untuk lobi dengan pihak PT Semen dan trading house Tuah Sakato (Pemda) serta pihak trading house lainnya.

Di Kalimantan Barat, JARUK kab. Pontianak dan Landak mengikuti pameran Inacraft 21-25 April 2010, dan Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia 23-27 Juni 2010 di JCC Jakarta. Hasil pameran menunjukkan besarnya minat ibu-ibu kelas menengah ke atas terhadap produk tas yang dijual (khususnya tentang desain, kualitas produk dan jenis produk craft Kalimantan), minat ibu-ibu untuk membeli dan memesan produk awal, meningkatnya permintaan pasar terhadap produk tas craft Kalimantan, adanya peningkatan pesanan produk kerajinan kepada kelompok pengrajin. Dan bagi JARPUK di Sintang telah mempelajari syarat-syarat ijin usaha, menjalin hubungan terus dengan pelanggan tetap dan membuat daftar untuk dikontak jika punya produk baru, berusaha menjalin hubungan dengan pihak lain yang bisa memfasilitasi pameran, dan mendesain kartu nama, label produk, dan mengumpulkan foto-foto produk untuk dibuat catalog produk (dokumentasi produk).

Sementara di tingkat nasional, fasilitasi pasar dilakukan dengan dua model; melalui promosi elektronik dan melakukan display produk di sekretariat, serta memfasilitasi penjualan/pengiriman produk PUK antar wilayah. Sementara e-comerse di tahun 2010 belum dilaunching karena perlu disusun dahulu mekanisme dan sistemnya yang telah mencapai 80%.

#### ***B.4. Penguatan organisasi JARPUK***

Di tahun 2010, ada kegiatan dan capaian yang dihasilkan JARPUK, khususnya di Padang Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kota Kupang, kab. Kupang, kab. Sukoharjo, Solo, Kudus, Bantul, Jombang, Gresik, dan Lombok Tengah. Di antara kegiatannya;

Di mulai dari JARPUK Jawa. Di Sukoharjo dilakukan pelatihan TOT kader untuk peningkatan ketrampilan JarpuK dalam pengelolaan organisasi perempuan dengan kemampuan analisa terhadap kebijakan pemerintah atas pengembangan ekonomi yang diikuti 31 PUK. Sementara di Solo, JARPUK mengadakan rapat kerja tahunan tanggal 18 November di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon yang diikuti 100 PUK dari 22 KPUK JarpuK Ngudi Lestari dan 50 undangan, seperti Dinas di



SKPD Pemkot Surakarta, PKK, GOW, Iwapi, Fatayat NU, Aisyiyah, Media, dan LSM, serta dibuka oleh Ibu Walikota Iriana Joko Widodo. Hasilnya, tersusunnya perencanaan Pengembangan Usaha, perencanaan pengembangan pasar, dan perencanaan penguatan organisasi seperti pelatihan pengorganisasian terkait dengan tupoksi pengurus, pelatihan kepemimpinan, pengembangan kelompok. Di Kudus, penguatan dilakukan dengan mengaktifkan pertemuan KPUK sebagai sarana untuk diskusi kegiatan dan penguatan anggotanya.



Pertemuan KPUK yang tergabung dalam Jarpuk Ngudi Lestari Solo, diisi diantaranya dengan diskusi tentang gender, informasi tentang kesehatan, dan praktek bersama ketrampilan teknis usaha. Selain itu, secara internal setiap KPUK di Jarpuk telah mandiri. Pengurus tiap kelompok menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seperti ketika dikirim untuk pelatihan, maka apa yang didapatkan di pelatihan selalu diinformasikan dan ditularkan ke anggota kelompok lainnya. Seperti yang dilakukan anggota kelompok Kumala, **Mbak Candra**. Resep yang didapatkan pada pelatihan Juli 2010 dipraktekkan di setiap pertemuan. Sementara kelompok Gandekan secara rutin melakukan pertemuan dengan agenda simpan pinjam. Dan kelompok Warna Alam yang telah mandiri sudah melakukan usaha bersama, melakukan simpan pinjam untuk membiayai usaha bersama. Di setiap minggu, mereka melakukan pertemuan untuk melakukan proses produksi dan selalu melakukan pertemuan jika mendapatkan persoalan.

Kapasitas Jar-PUK dan KPUK semakin berkembang, hal ini terlihat dari kemampuan pengurus dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah dan kemampuannya dalam mengorganisir dan memotivasi anggota untuk melakukan pengembangan usaha dan persoalan perempuan. Rasa solidaritas pengurus jar-PUK terhadap perempuan lain terus terbangun, hal ini terlihat dari keterlibatan beberapa pengurus dalam melakukan rekrutmen anggota baru, serta proses pembentukan kelompok di wilayahnya dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang belum sensitif gender.



Sementara itu, Jarpuk Anugrah Kudus memperluas jaringan dengan penambahan kelompok baru sebanyak 6 KPUK, dari 7 kelompok (80 PUK) menjadi 13 kelompok (139 PUK). Penambahan kelompok/PUK juga terjadi di Sukoharjo jumlah kelompok bertambah dari 19 kelompok (301 PUK) menjadi 24 kelompok (400 PUK), dari 5 menjadi 6 kecamatan. Begitu juga dengan Jarpuk Ngudi Lestari Solo, kelompok bertambah dari 18 kelompok (325 PUK) menjadi 22 kelompok (373 PUK). Di Kota Padang, anggota Jarpuk Gapermita bertambah dari 13 KPUK (183 PUK) menjadi 14 KPUK (207 PUK).

Di Kalimantan Barat, penguatannya, pertama, dengan konsolidasi kelompok meski belum intensif, karena anggota beberapa Jarpuk mengalami perbedaan persepsi tentang Jarpuk dan sulitnya pertemuan bulanan antar anggota yang berjauhan. Dalam konsolidasi anggota diajak melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama ini serta merumuskan tindak lanjut ke depan. Kedua, raker Jarpuk tahunan perencanaan melalui workshop perencanaan untuk membuat kerangka kerja yang terstruktur untuk kegiatan.

Di Padang, diadakan diskusi intensif antara JARPUK dengan pendamping tentang keberadaan dan jalan keluar pembenahannya. Hasilnya, peserta mengetahui persoalan yang ada dan dapat mengerti untuk mengembangkan organisasi sesuai fungsi dan tugas serta berjanji bahwa semua kelompok saling mendukung. Selain itu dilakukan asistensi terutama

dalam hal pelaporan keuangan dan kegiatan. Dan CO sebagai ujung tombak pengorganisasian di tingkat lapangan diberikan pengertian tentang keberadaan dan perannya dalam organisasi dan masyarakat. Pelatihan penyadaran sensitifitas gender juga dilakukan. Dalam pelatihan peserta saling berbagi pengalaman sehingga mereka termotivasi untuk bergerak lepas dari persoalannya selama ini dengan dipahaminya 5 ketidakadilan gender. Kemudian KPUK di 3 desa dalam satu kecamatan di Banda Aceh, kab. Karo, kab. Klaten, kota Pontianak dan kab. Kupang melakukan penyadaran kritis tentang upaya mendorong integritas pejabat yang dimulai dengan akuntabilitas penyusunan dan penggunaan anggaran pembangunan, terhadap anggotanya dengan melibatkan kelompok lain di desanya. Adapun kegiatan penguatan kesadaran kritis KPUK berupa; diskusi kampung, workshop kecamatan, fgd dan pembentukan forum integritas.

### ***B.5. Monitoring LKP***

Dari pemantauan Seknas dan Sekwil, secara umum perkembangan LKP di sejumlah wilayah beragam. Ada LKP mempunyai perkembangan stagnan, karena beberapa alasan seperti lesunya usaha anggota karena terpaan krisis global dan kondisi lokal. Faktor kemampuan pengelola dan intensitas pendampingan NGO anggota juga berkontribusi terhadap perkembangan LKP. Hal itu diketahui dari laporan yang terkirim dua kali dalam satu tahun ke seknas ASPPUK dan monitoring langsung setiap tahun bersama ASWIL.



Dalam hal kredit macet, angsuran peminjam telah dilakukan tetapi belum sesuai jadwal yang disepakati, dan jumlah angsuranpun masih belum maksimal. Alasan penunggakannya, yaitu usaha yang dijalankan mengalami kendala sehingga omzetnya pun menurun. Anggota yang mempunyai pinjaman tetap berjanji akan mengangsur meskipun pada kenyataannya tidak seperti perjanjian. Pendamping dan pengurus LKP sudah bekerja maksimal untuk menyelesaikan permasalahan LKP, namun kesadaran peminjam untuk melunasannya masih terus dibenahi.

Dalam menangani keuangan LKP ada perubahan “metode”, yang diharapkan membawa hal positif dalam keuangan LKP. Pengelola LKP dan seluruh pengurus Jarpuk bekerjasama dalam pelaksanaan kesepakatan yang dibuat seluruh anggota, agar kondisi LKP bisa lebih baik dalam melayani anggota. Hal itu menjadi penting, karena selama ini arti penting LKP kurang mendapatkan porsi perhatian yang seimbang oleh Jarpuk, karena sejak awal penanganan persoalan belum diatasi dengan cepat sehingga ketika membesar semakin sulit penanganannya, dan terkadang beberapa pengurus JARPUK menjadi bagian dari persoalan. Sehingga cenderung pengurusan JARPUK membiarkannya, dan karena kemampuan penanganan persoalan LKP membutuhkan ketrampilan khusus, dimana Jarpuk masih terbatas kemampuannya.

### ***B.6. Advokasi Kebijakan di Tingkat Kabupaten***

Di samping pengembangan usaha, KPUK dan JARPUK sebagai organisasi massa telah mendorong terwujudnya hak-hak perempuan sebagai warga negara. Di tahun 2010, JARPUK telah berusaha untuk membantu anggotanya dengan melakukan aktifitas advokasi demi tercapainya hak-hak PUK sebagai warga negara dan pengembangan usaha.



Gambaran itu terlihat dari keterlibatan Jarpuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Seperti dilibatkannya Jarpuk Solo dalam musrenbang yang membahas RPJMD yang diadakan pada bulan Desember 2010. Yang ikut dalam Forum ini adalah ketua Jarpuk dimana ia menjadi tim perumus RPJMD Kota Solo. Kemudian pada bulan Nopember 2010, pengurus jar-PUK Kecamatan Mojolaban telah mengajukan proposal ke dinas PP dan KB, untuk mendapatkan alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan lain seperti vitamin sebagai sarana melakukan layanan kesehatan bagi anggota koperasi Perempuan Makmur. Sementara itu anggaran (APBD) tahunan dari kabupaten Sukoharjo untuk Jar-PUK Kartini tahun 2010, digulirkan pemerintah setempat sebesar Rp. 2.000.000.

Sementara itu anggota JARPUK di tiga desa di Lombok Timur berhasil melibatkan anggota DPRD perempuan untuk aktif dalam kegiatan diskusi di tingkat desa yang mengangkat issue program dan kebijakan yang tidak responsif gender. Dalam diskusi tersebut aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tomas, PKK, pemuda, dan sejumlah kader KPUK, serta Ornop anggota ASPPUK (LPSDM) terlibat aktif. Hasilnya ada usulan kebijakan dan program yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama kelompok perempuan, dan anggota perempuan DPRD tertarik dengan kegiatan tersebut sehingga dia akan mengajukan kegiatan sejenis untuk bisa didanai di tahun yang akan datang, karena dinilai mempunyai dampak positif di Lombok Timur, khususnya bagi perempuan.

Kemudian di kota Pontianak, khususnya di kecamatan Pontianak Timur, berkat keterlibatan KPUK dan PPSW-Borneo (anggota ASPPUK) terlibat aktif dalam perencanaan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan. Sehingga pihak kecamatan meminta KPUK dan Ornop untuk membantu dalam membuat dokumen RPJM kecamatan sehingga pembangunan yang responsif gender bisa dilakukan dari hulunya. Di tingkat kabupaten, bersama jaringan LSM lain, JARPUK dan Ornop anggota aktif mengawasi pembahasan APBD 2011 pada bulan nopember dan Desember 2011. Mereka mendesak DPRD dan aksekutif untuk terbuka dalam pembahasannya, karena telah ada UU kebebasan informasi dimana rakyat berhak mengetahui semua kebijakan publik. Kemudian upaya-upaya JARPUK dan KPUK di daerah lain yang belum terekam dalam laporan. Demikian pula KPUK dan NGO pendamping di kec. Meuraksa Banda Aceh, kec. Kabanjahe kab. Karo, kec. Jatinom Klaten dan kec. Kupang Tengah kab. Kupang, menganalisis hasil musrenbang desa dan kecamatan sebagai bekal untuk menyusun prioritas program sesuai kebutuhan rakyat yang responsif gender.

## C. Publikasi

### C.1. Berita PUK-mikro melalui Website

Keberadaan teknologi website tidak dipungkiri peranannya sebagai salah satu alat organisasi untuk melakukan penyebaran informasi. ASPPUK menata system informasi, salah satunya dengan teknologi website. Melalui website dan mailinglist berita PUK dengan cepat dibaca khalayak luas khususnya anggota ASPPUK.

Pengembangan website ASPPUK ([www.asppuk.or.id](http://www.asppuk.or.id)) di tahun 2010 telah

dibangun ke arah website e-commerce yang menyajikan kumpulan produk PUK berbagai wilayah ASPPUK sehingga website ASPPUK menjadi etalase produk PUK di seluruh wilayah. Salah satu upaya untuk mendorong aktivitas ini, diantaranya wilayah Jawa memiliki situs website ([www.asppukjawa.org](http://www.asppukjawa.org)) sebagai media anggota ASPPUK Jawa untuk berbagi informasi dan penyajian produk PUK. Dalam Website ini terpampang sejumlah produk, seperti dari seknas ASPPUK, katalog JARPUK Sukoharjo, produk PUK dari Solo. Sementara yang lain masih menunggu produk yang layak dan diharapkan di tahun 2011 akan ada perkembangan karena personil yang bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi dan IT spesialis telah bergabung dengan seknas ASPPUK.



Selain e-commerce, website ASPPUK dikembangkan sebagai penyedia data perkembangan PUK. Untuk mewujudkannya, ASPPUK membangun Web Base Survey dengan domain [www.asppuk.org](http://www.asppuk.org) (pertengahan 2009). Melalui web base survey diharapkan ASPPUK dan jejaringnya memanfaatkan web base sebagai pusat informasi data PUK sehingga mendorong proses pertukaran informasi di kalangan PUK.

## D. Advokasi dan Networking

### D.1. Tingkat JarpuK; Pengembangan Aliansi JarpuK

Pada tingkat kabupaten, Jar-PUK sebagai bagian masyarakat sipil memelihara hubungan dengan komponen lain. Bahkan kini dalam upaya mendorong integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah, KPUK sebagai anggota JARPUK berhasil membentuk forum penegak integritas di tingkat 5 kecamatan (Meuraksa, Kabanjahe, Jatinom, Pontianak Timur dan Kupang Tengah di 5 kabupaten (Banda Aceh, Karo, Klaten, Pontianak dan kab. Kupang)



Hal itu menjadi bagian aktifitas JARPUK yang tak terpisahkan, karena disadari tak mungkin menyuarakan hak-hak PUK tanpa beraliansi. Aktifitas tersebut yang terus didokumentasikan seknas ASPPUK dan disebarluaskan kepada JARPUK di tempat lain. Namun begitu, mobilisasi aliansi antar JARPUK di tingkat nasional, di tahun 2010 belum dilakukan, karena beberapa kendala seperti keterbatasan dana dan maraknya isu pada tingkat kabupaten sehingga energi JARPUK tercurahkan pada tingkat lokal. Selain itu, issue nasional tidak secara nyata menarik animo masyarakat -- seperti salah satu issue yang menjadi hambatan pengembangan usaha secara nasional yaitu CAFTA yang diluncurkan tahun 2010 dan telah menimbulkan dampak buruk --, namun belum mendapat perhatian serius. ASPPUK secara nasional telah menginisiasi beberapa diskusi secara informal dengan JARPUK di beberapa wilayah, namun belum keseluruhan dan belum secara sistematis. Diharapkan tindakan kongrit berupa advokasi nasional dilakukan pada tahun 2011.

## ***D.2. Tingkat Nasional***

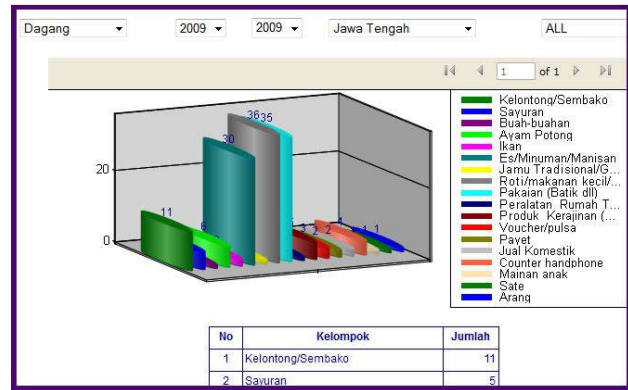
Sementara pada tingkat nasional, aktifitas advokasi dan jaringan banyak dilakukan ASPPUK, seperti:

1. Keterlibatannya sekretariat nasional dalam pengkritisan RAPBN 2010 perubahan, yang beserta masyarakat sipil lainnya melakukan analisa anggaran pembangunan dan belanja nasional (APBN) dan melakukan yudicial review (JR) kepada mahkamah konstitusi (MK). Gugatan ini belum berhasil, alasan hakim konstitusi adalah persoalan waktu yang sempit. Menurutnya, waktu keputusan diambil saat bulan Desember, sementara APBNP perubahan habis saat bulan Desember juga. Namun itulah alasan MK untuk melemahkan gugatan kita. Sebab dengan alasan "emergency" sebenarnya kasus-kasus tertentu bisa didahulukan, seperti kasus Yusril Ihza Mahendra waktu itu. Tapi MK tidak mau itu terjadi. Dan pengumumannya pun dilakukan Pak Machfud (ketua MK) saat ditanya wartawan, dan tidak melalui surat kepada kuasa hukum penggugat. Koalisi melakukan protes keras dan berkirim surat ke MK. Tahun 2011, ada rencana jaringan akan mengajukan yudicia review untuk UU APBN 2011 dari jauh-jauh hari sebelumnya
2. Aktif dan berpartisipasi dalam advokasi masyarakat sipil untuk pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Dalam hal itu, ASPPUK juga menjadi anggota aktif dalam Koalisi masyarakat sipil untuk MDGs yang menjadi leading sektor dalam penulisan laporan masyarakat sipil (citizen report) tentang analisa sepuluh tahun pencapaian MDGs pemerintah RI. Penyusunan citizen report 2010 terhenti karena minimnya support dana untuk pencetakan dan penerbitan. Rencananya penulisan citizen report dilanjutkan di tahun 2011 sembari mencari peluang sumber dana yang akan mensupport.
3. Secara aktif, ASPPUK terlibat dalam *E-net fo Justice (Education Network)*, yaitu jaringan nasional yang memperjuangkan pendidikan untuk keadilan di Indonesia. Dalam hal itu, ASPPUK terlihat aktif untuk mengkritisi sistem pendidikan Indonesia yang sudah mengarah kepada "komersialiasi" sebagai efek dari "privatisasi" negara. Capaian advokasi bersama ini adalah dipublikasikannya press release tentang analisa-analisa budget untuk sektor publik termasuk pendidikan dari APBN 2011 di dalam media Jakarta Globe news. Selain itu, jaringan juga berhasil mendorong dalam kampanyenya tentang penolakan komersialisasi pendidikan tinggi, sehingga UU BHP berhasil ditolak oleh MK.

## E. Pengembangan Kapasitas Lembaga

### E.1. Website Maintenance dan Pengembangan Data Base

Di tahun 2010, ASPPUK mengembangkan website lebih maju dari sebelumnya. Salah satunya membangun konten yang mendukung pada teknologi web yang berbasis e-commerce. Hingga akhir tahun 2010, website ASPPUK telah mencapai 80% dengan tampilan baru dan mengintegrasikan pengembangan pasar produk PUK berbasis web atau e-commerce. Pengembangan website ASPPUK juga dibantu volunteer dari mahasiswa IT yang mengembangkan website dengan formula dan wajah baru.



Selain itu, dalam konteks pendataan, sejak tahun 2003 ASPPUK telah melakukan pendataan secara manual, sehingga masih terpusat pada Seknas Nasional ASPPUK dan sulit mendapatkan update data dari wilayah. Oleh karena itu, menyambung sistem yang telah dikembangkan pada tahun 2009, di tahun 2010 ASPPUK melanjutkan pendataan PUK secara On line. Diharapkan anggota ASPPUK mampu memperbaharui data PUK dari wilayah masing-masing, sehingga tidak bergantung Seknas. System on line dimaksudkan untuk mengurangi biaya operasional pendataan. Teknologi itu dikembangkan ASPPUK dengan sejumlah NGO anggota secara swadaya bekerjasama dengan PT. Netrain (salah satu penyedia jasa pengembangan program ICT). Pendataan berbasis web site, menguntungkan seknas, sekwil, NGO pendamping, JARPUK dan juga LKP, sehingga pengetahuan tentang profil setiap anggota JARPUK diketahui dengan baik. Namun sayang, teknologi web base masih belum menyeluruh pemanfaatannya, karena belum ada sosialisasi dan pelatihan yang kontinue karena keterbatasan sumberdaya.

Selain itu, beberapa kendala penggunaan web base masih terjadi, seperti; terbatasnya infrastruktur komputer dan jaringan internet di wilayah, karena sebagian besar wilayah ASPPUK di pedesaan. Lebih jauh seknas telah menyediakan tenaga IT yang menangani bidang ICT, sehingga dapat mengawal, mengembangkan, dan memelihara website yang berbasis data dan e-commerce. Meskipun berat di awal pengoperasiannya, namun lambat laun kader jarpuK dan NGO pendamping akan familiar untuk memperbaiki pendataannya.

### E.2. Monitoring JARPUK

Monitoring secara teratur dilakukan ASPPUK (baik melalui seknas maupun sekwil) setiap 6 bulan pada tingkat wilayah dan setiap 1 tahun bersama wilayah, seknas melakukan

kunjungan lapangan. Sebelum monitoring, setiap sekwil (di dalam laporan forwilnya) melaporkan kegiatan yang ditembuskan ke seknas ASPPUK. Dari laporannya, perkembangan LKP dan JARPUK secara tertulis terlihat. Disamping itu, monitoring dilakukan Komite Eksekutif Nasional dan ASPPUK wilayah – dalam setiap forum wilayah -- setiap satu tahun.

Hasil monitoring terlihat bahwa JARPUK dan KPUK melakukan pengembangan kapasitas dalam penguatan bisnisnya sehingga ia berdampak kepada ekonomi keluarga dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, perkembangan LKP masih lambat namun mempunyai prespektif di tahun depan. Hal itu terlihat dari adanya penambahan anggota JARPUK yang berpotensi untuk menjadi anggota LKP.

### ***E.3. Monitoring Ornop Anggota***

Monitoring ASPPUK kepada NGO anggota dan JARPUK dilakukan setiap tahun. Monitoring khususnya untuk melihat keaktifan anggota dalam pendampingan PUK, dan untuk memantau kelanjutan program nasional. Di tahun 2010, monitoring dilakukan bersamaan dengan forum wilayah yang dilakukan di setiap wilayah.



Hasilnya diketahui bahwa ada anggota baru di wilayah sumatera dan ada yang kurang aktif, sehingga (di wilayah NT dan Jawa) mereka mendapatkan peringatan saat forwil. Selain itu di wilayah Sulawesi terjadi penurunan aktifitas, karena minimnya dukungan eksternal donor dalam pengembangan program, dan adanya pengurus yang masuk dalam legislatif daerah. Sementara itu, di wilayah Sumatera, sekretaris eksekutif wilayah (SEW) yang baru terpilih masih mempelajari tugas barunya sehingga terkesan “lambat” dalam menjalankan fungsinya seperti asistensi dan monitoring kegiatan ASPPUK di wilayah.

### ***E.4. Pengembangan Konsep BDS***

Seknas diamanatkan untuk bertanggung jawab dalam penyusunan dan dokumentasi tentang desain besar atas konsep BDS yang telah dibincangkan di tingkat wilayah. Oleh karenanya di pertengahan tahun 2010, ASPPUK melakukan pembahasan konsep pengembangan BDS yang draftnya disusun konsultan Hivos dan diajukan pada *meeting* pengurus ASWIL Jawa, KEN dan anggota yang berada di Jawa.

Proses diskusi diawali dengan mengkaji kembali hasil temuan Akatiga dan memetakan kondisi ASPPUK dalam konteks BDS. Tahap berikutnya pemahaman bersama tentang model pengembangan BDS provider dan BDS fasilitator, dan dilanjutkan dengan pembuatan workplan pengembangan BDS. Hasil umum adalah Asppuk wilayah jawa sebagai BDS fasilitator dan LSM anggota sebagai BDS provider, Jarpuk melakukan fungsi koordinasi dan pengorganisasian, terpetakan persoalan Asppuk untuk mendirikan BDS seperti; mindset, konsep, action plan, unit khusus, funding, pola relasi kemitraan, jaringan, peningkatan kapasitas SDM, dan minimnya kemampuan pendokumentasian serta publikasi.

Pertemuan berikutnya menghasilkan rekomendasi, antara lain; peran BDS fasilitator dijalankan Sekretariat ASPPUK (Seknas dan ASWIL). Untuk kelancarnya perlu dikaji pembagian masing-masing peran agar tidak tumpang tindih. Beberapa alternatif layanan yang difasilitasi Sekretariat ASPPUK selaku BDS fasilitator antara lain; pertama jasa pelatihan dan konsultasi, (misal TOT, pengembangan kelembagaan (OD), dll) sedangkan LSM anggota melayani PUK. Kedua fasilitasi pemasaran, agar tidak terjadi duplikasi dalam kegiatan usaha, maka BDS fasilitator memfokuskan pada upaya memfasilitasi kegiatan pemasaran yang dikelola LSM anggota. Misalnya mengkoordinasi toko online lewat penyediaan website untuk promosi produk anggota, sedangkan penjualan produknya sendiri bisa dilayani ASWIL. Hal ini untuk menyederhanakan dan mempercepat transaksi. Beberapa alternatif income dari online marketing, ialah; seknas berkewajiban terhadap; (i) biaya sewa dan maintenance toko online, (ii) revenue sharing (misal 2% dari hasil penjualan), (iii) iklan (dari pemasangan iklan di website marketing online ASPPUK). Sementara sekwil mendapat margin penjualan (selisih harga dari PUK dan harga jual ke pembeli).

Database guna mendukung pelayanan BDS yang diberikan LSM anggota. Untuk pengembangan database, koordinasi dapat dilakukan oleh Seknas bersama Sekwil bekerja sama dengan LSM anggota dan JARPUK. Sekwil bisa mengkoordinasi database di wilayah masing-masing dan Seknas menjadi pusatnya di tingkat nasional.

## F. Jaringan Kerja

Berikut ini, mitra dan jaringan kerja ASPPUK;

USAID	Amerika Serikat
Hivos	Belanda
Ford Foundation	Amerika Serikat
OXFAM-Australia	Australia
Acces	Australia
Konsil LSM Indonesia	Kelompok kerja untuk peningkatan akuntabilitas LSM
Koalisi masyarakat Sipil Untuk Pencapaian MDGs	Indonesia
JANPUKM	Jaringan nasional Pengembangan Usaha Kecil-Menengah
E-net For Justice Indonesia	Jaringan Pendidikan untuk Keadilan
Koalisi Masyarakat sipil untuk APBN Kesejahteraan	Indonesia
Kemitraan Untuk Tata pemerintahan Yang baik	Indonesia
Kementerian Perempuan Dan Anak	Indonesia
Jaringan Perempuan entrepreneur	Indonesia



## **Penutup**

Sejumlah tantangan menunggu ASPPUK di tahun 2011. CA-FTA atau perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan China merupakan salah satu hajat besar yang harus dihadapi di awal tahun 2010. Untuk itu, ASPPUK dengan segala potensi dan kekurangannya, perlu merapatkan barisan dan beraliansi strategis dengan NGO lainnya serta ditingkat basis mendorong JARPUK untuk beraliansi dengan organisasi lain yang se visi untuk menghadapi segala kemungkinan tersebut. Semoga tahun 2010 yang telah dilampau menambah amunisi untuk belajar menyongsong tahun depan yang penuh tantangan. Amin.

**ASOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL (ASPPUK)**

**POSISI KEUANGAN**

**PER 31 DESEMBER 2010**

<b>ASSET LANCAR</b>		
Kas dan SetaraKas		2,389,648,342
Piutang Kredit Mikro		255,651,800
Piutang LKP		1,194,941,250
Piutang Karyawan		-
Uang Muka		1,127,364,945
	<b>JUMLAH ASSET LANCAR</b>	<b>4,967,606,337</b>
<b>ASSET TIDAK LANCAR</b>		
Harga Perolehan		209,474,700
Akumulasi Penyusutan		(175,924,554)
Nilai Buku		33,550,146
	<b>JUMLAH ASSET</b>	<b>5,001,156,483</b>
<b>KEWAJIBAN DAN ASSET BERSIH</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
Hutang Donor		51,783,975
Hutang Tabungan Solidaritas		20,985,755
Hutang Pada Lembaga Lain		343,418,825
Biaya yang Masih Harus Dibayar		-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>416,188,555</b>
<b>ASSET BERSIH</b>		
Asset Bersih Awal Tahun		2,802,495,274
Perubahan Asset Bersih		1,782,472,654
	<b>JUMLAH ASSET BERSIH</b>	<b>4,584,967,928</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASSET BERSIH</b>	<b>5,001,156,483</b>